

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

Edisi Rabu, 31 Mei 2023

KORAN DIGITAL
LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat
12 Halaman
download edisi digital
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

lentera.tv

@lenteratoday

Lentera TV Media

LenteraPodcast

@lenteratoday

TARIK URAT LAGI KPK TOLAK DIPERIKSA OMBUDSMAN RI

Tarik urat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (RI) bukan kali pertama terjadi. Dalam episode baru kali ini, dua lembaga negara tersebut bersitegang terkait laporan Brigjen Endar Priantoro soal dugaan maladministrasi pencopotannya dari Dirdik KPK. Komisi anti-rasuah menolak panggilan klarifikasi Ombudsman. Sebagai pihak terlapor lembaga di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sudah dipanggil sebanyak 2 kali, tanggal 11 dan 17 Mei 2023, namun tak kunjung dipenuhi. Bahkan, Ombudsman mengaku berang karena malah 'dikuliahi' KPK. Pihak KPK menilai Ombudsman tidak memiliki wewenang mengusut kasus Endar. Lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tak mau mengendurkan langkah, Ombudsman membuka peluang jemput paksa. Diketahui, sebelumnya keduanya juga sempat ribut saat proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Duh!

(Baca Hal 11)

BEBERAPA CATATAN AKSI KONTROVERSIAL FIRLI BAHURI

1. Terbukti Melanggar Kode Etik Berat

Pada tahun 2019, atau sehari sebelum Firli melakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR RI, lembaga antirasuah menyatakan bahwa mantan Deputi Penindakan KPK itu terbukti melanggar kode etik berat. Firli diduga melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (MZM) alias Tuan Guru Bajang (TGB) sebanyak dua kali pertemuan.

2. Bertemu Komisaris PT Pelindo I di Tengah Pengusutan Korupsi

Pertemuan antara Firli dengan Komisaris PT Pelindo I juga menjadi sorotan. Ini karena KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Pelindo. Hal ini diketahui setelah akun instagram milik Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mendadak ramai setelah mengunggah video Firli Bahuri yang tengah melakukan pertemuan dengan Komisaris Pelindo I Timbo Siahaan.

3. Ditolak Jadi Ketua KPK

Penolakan terhadap Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK sempat masif dinarasikan publik. Bahkan, ICW saat itu menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak hanya ditolak oleh pegiat antikorupsi, ia juga mendapat penolakan langsung dari internal KPK.

4. Memanfaatkan Jabatan untuk Cari Popularitas

ICW menduga Firli Bahuri memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk mendapat simpati masyarakat. Pernyataan ini disampaikan peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyikapi adanya pesan singkat atau SMS terhadap masyarakat yang mengatasnamakan Ketua KPK.

5. Menggunakan Helikopter Mewah

ICW menduga Firli Bahuri mendapat diskon dalam penyewaan helikopter yang ditumpangnya itu. Sehingga hal ini dianggap janggal, harus ditelusuri Dewas KPK. Firli dalam perjalanannya ke Baturaja, Sumatera Selatan yang menggunakan helikopter telah dijatuhkan melanggar kode etik oleh Dewas KPK.

6. Ribut dengan Brigjen Endar Priantoro

Firli Bahuri bersama Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dilaporkan ke Dewas KPK oleh Brigjen Pol Endar Priantoro setelah dipecat dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Endar menyebut, pelaporan itu dilayangkan, karena Firli Bahuri tidak menghargai surat penugasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

**Government (Hal.2)
Saat Pembangunan
IKN 'diganjal'
di DPR, Sri Mulyani:
Tetap Lanjut!**

Diberitahukan kepada pembaca setia, Kamis (1/6/2023) Koran Lentera Today tidak terbit terkait libur Hari Lahir Pancasila. Terbit kembali pada Jumat (2/6/2023). Update berita bisa terus dinikmati melalui www.lenteratoday.com.

Saat Pembangunan IKN 'Diganjal' di DPR, Sri Mulyani: Tetap Lanjut!



Presiden Joko Widodo (kiri) berfoto bersama pemenang sayembara logo Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Aulia Akbar (kanan) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5/2023). (ist)

JAKARTA - Kritikan datang dari dua fraksi di DPR yakni Demokrat dan PKS yang meminta agar anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024 tidak dialokasikan terlebih dahulu. Menanggapi itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bila pemerintah bakal tetap melanjutkan pembangunan Nusantara.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah sepakat dengan DPR yang meminta peningkatan kualitas belanja negara. Ia menyebut langkah ini dilakukan demi menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demi meningkatkan kualitas belanja tahun depan, Ani menegaskan pemerintah bakal berfokus pada 5 program prioritas yang bisa mempercepat transformasi ekonomi. Pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui program PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, hingga link and match.

Kedua, penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas JKN, kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang handal. Ketiga, Ani menyoroti soal percepatan pembangunan infrastruktur. "Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)," tegasnya dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di DPR, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Keempat, Ani mengatakan pemerintah bakal terus mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA). Kelima, ia menyebut pemerintah bakal mendorong efektivitas program

perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Penjelasan ini adalah tanggapan Sri Mulyani atas pandangan DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Setidaknya ada dua fraksi yang meminta pemerintah menunda pembangunan IKN, yakni Demokrat dan PKS.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal urgent. Ia menilai anggaran pembangunan IKN tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin demi mendorong pemulihan daya beli.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya, Selasa (23/5).

Serupa, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai seharusnya pemerintah fokus menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya nonprioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan difokuskan dulu

untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Di lain sisi, 9 fraksi lain setuju dengan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pohon Hayat Dipilih Jadi Logo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan logo bertema pohon hayat sebagai logo IKN Nusantara. Jokowi mengatakan logo tersebut merupakan hasil sayembara dengan proses yang selektif. "Hari ini kita akan melakukan peluncuran logo baru ibukota nusantara yang nantinya ini akan menjadi identitas visual bagi IKN. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Otorita bahwa telah melalui proses sayembara yang sangat selektif," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Jokowi menekankan logo tersebut bukan dipilih Presiden. Logo pohon hayat itu merupakan pilihan dari masyarakat. "Alhamdulillah telah terpilih logo dengan pemilih terbanyak, jadi yang milih bukan presiden. Hati-hati, hati-hati, yang memilih ini rakyat dan jumlahnya juga pemiliknya berapa tadi lima ratusan ribu. Jumlah juga yang tidak sedikit," ujar Jokowi.

Logo bertema pohon hayat merupakan hasil karya desainer Aulia Akbar. Jokowi berharap logo IKN tersebut memberikan spirit untuk mewujudkan kehidupan baru. "Logo yang terpilih bertema pohon hayat

yang di desain oleh Mas Aulia Akbar. Pohon hayat ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya, yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan filosofi pohon hayat juga sejalan dengan pembangunan IKN. Tema pohon hayat itu selaras dengan spirit menumbuhkan rasa bangga Indonesia. "Logo pohon hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya," ujar Jokowi.

"Dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan ibu kota Nusantara kita, ibu kota masa depan Indonesia," sambung Jokowi. (wid,rls,ist/dya)



**KEMUDAHAN
BERINVESTASI DI
IKN NUSANTARA**

**PEMENUHAN KEBUTUHAN
ANGGARAN IKN**


APBN
 **RP 88.54 T –
RP 92.34 T (19%)**


Investasi Pelaku Usaha
 **RP 377,46 T –
RP 393,66 T (81%)**


**Total Anggaran
RP 466 T – 486T**

SKEMA INVESTASI

(Berdasarkan Perpres 63 tahun 2022)

 **KERJA sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**
Diprakarsai menteri, kepala lembaga, direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Kepala Otorita IKN dan badan usaha.

 **KERJA sama inventasi dengan badan utama**
Kerja sama dengan badan usaha dalam dan luar negeri melalui Badan Usaha Otorita.

 **Dukungan pendanaan/pembiayaan Internasional**
Mewadahi pemberian dana dari lembaga bilateral/ multilateral melalui hibah atau pemberian dana talangan.

Geger Rumor Pemilu Coblos Partai Anggota DPR Ancam Cabut Kewenangan MK

JAKARTA - Delapan Fraksi di DPR RI menolak jika sistem Pemilu diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai. DPR mengancam bisa mengubah Undang-Undang terkait Mahkamah Konstitusi (MK), jika hakim memutuskan mengubah sistem Pemilu.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman awalnya menyatakan DPR tak ingin unjuk kekuasaan. Namun, dia mengingatkan semua pihak bahwa DPR punya kewenangan sebagai lembaga legislatif. "Ya jadi kita tidak akan saling memerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif, kami juga punya kewenangan," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan," lanjutnya.

Konferensi pers ini digelar delapan fraksi di DPR usai beredar rumor bahwa MK akan mengubah sistem Pemilu dari coblos nama caleg menjadi coblos gambar partai saja. Habiburokhman mengingatkan MK bahwa DPR bisa merevisi UU MK dan mencabut kewenangan MK. "Kalau perlu UU MK juga kita ubah, kita cabut kewenangannya, akan kita perbaiki supaya tidak terjadi begini lagi," ungkap Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan kedelapan fraksi itu sudah sepeham dengan dirinya terkait hal ini. "Iya, kan ini tadi," kata politikus Gerindra ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir mengatakan, "Sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama. Kemudian kalau itu mau diubah itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik calegnya itu dari DPRD kabupaten/kota DPR RI jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300 ribu."

"Kita meminta supaya tetap sistemnya terbuka. Kalau mereka memaksakan mungkin orang-orang itu akan meminta ganti rugi. Paling tidak mereka urus SKCK segala macam itu ada biayanya. Kepada siapa ganti ruginya mereka minta? Bayangkan Rp 300 ribu orang itu minta ganti rugi, dan dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu," imbuh dia.

Wakil Ketua MPR Fraksi PAN Yandri Susanto memandang jika MK mengabaikan gugatan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, maka independensi MK perlu dipertanyakan. Sebab menurutnya mayoritas publik ingin sistem pemilu tetap terbuka atau coblos nama. "Ini aspirasi murni, ini jangan sampai MK itu mengangkangi aspirasi rakyat, ini kan representasi dari aspirasi rakyat. Maka

sikap negarawan itu dituntut MK. Sudah berapa kali orang meng-gugat presidential threshold selalu bahasa MK itu open legacy pembuat undang-undang. Sama saja, di sistem pemilu. Jadi kalau sampai MK me-mutuskan hal yang berbeda dengan putusan yang tahun 2008, artinya MK sedang bermain dua kaki," papar Yandri.

Sementara, Ketua Fraksi NasDem Roberth Rouw berharap Presiden Jokowi bisa menyatakan sikap dan mendorong MK memutuskan pemilu tetap terbuka. "Kami minta kepada presiden harus juga bersuara sebagai kepala negara, karena ini adalah suara rakyat. Bersualah kepada MK agar MK tidak buat gaduh politik yang sudah kami jalani, sudah lebih dari setahun proses pemilu ini kami lakukan," terang dia.

"Sekali lagi, kami mohon agar sebagai pimpinan tertinggi kepala negara ikut juga untuk memberikan dukungan agar MK tidak bermain-main," ungkap dia.

Tampak hadir pula Ketua Fraksi PAN Saleh Dauly, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara dan Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi.

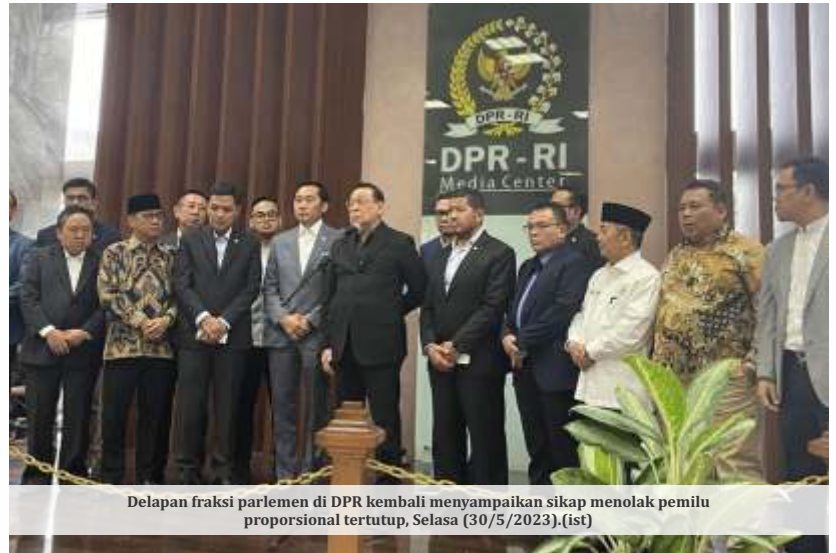
Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Pakar hukum tata negara dan advokat Denny Indrayana membantah menggunakan istilah A1 saat mengklaim mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memiliki putusan dalam uji materi sistem Pemilu. Dalam klaimnya, Denny menyebut MK akan memutus mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

Usai viral, pendiri Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm itu menegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014 ini mengatakan rahasia putusan MK ada di mahkamah. Sedangkan, informasi yang ia dapat bukan dari lingkungan MK, pun bukan dari hakim konstitusi atau elemen lain di sana. "Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK. Padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa (30/5/2023).

Ia menjelaskan sudah cermat dan hati-hati memilih frasa. Misalnya, ia mengatakan 'mendapatkan informasi' dan bukan 'mendapatkan bocoran'. Ia juga menegaskan tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusannya. Ia mengatakan menulis '...MK akan memutuskan' sehingga masih akan atau belum diputuskan.

"Saya juga secara sadar tidak menggunakan istilah 'informasi dari A1' sebagaimana frasa yang digunakan dalam twit Menkopolkum Mahfud



Delapan fraksi parlemen di DPR kembali menyampaikan sikap menolak pemilu proporsional tertutup, Selasa (30/5/2023). (ist)

MD. Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari 'Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya'," ujar Denny.

Denny mengklaim informasi yang ia terima sangat kredibel dan karena itu patut dipercaya. Sehingga, ia memutuskan untuk melanjutkannya kepada masyarakat luas sebagai bentuk pengawasan publik agar MK hati-hati

dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut.

Denny mengingatkan putusan MK bersifat mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali (final and binding). Oleh karena itu, ia menuturkan untuk menjaga MK agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak, hanya sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka mahkamah. (wid,rls,ist/dya)

Kekurangan-Kelebihan Sistem Pemilu Proporsional TERTUTUP ATAU TERBUKA

Pemilu 1955-1999	BERLAKU	Pemilu 2004-2019
Hanya logo parpol	SURAT SUARA	Logo parpol dan nama kader caleg
Dipilih partai	KANDIDAT CALEG	Dipilih masyarakat
Berdasarkan nomor urut	PENETAPAN CALON TERPILIH	Berdasarkan suara terbanyak
Perkuat kaderisasi parpol	KELEBIHAN	Masyarakat menentukan caleg
Kader potensial diutamakan		Tingkatkan partisipasi publik
Minim politik uang		Partai tidak bisa otoriter
Minim interaksi partai dan masyarakat	KERUGIAN	Lebih kompetitif
Potensi partai jadi otoriter		Biaya kampanye mahal
		Rawan politik uang



Tanggapi Kritikan soal Ekspor Pasir Laut Pemerintah Ngotot Tak Merusak Lingkungan

JAKARTA - Derasnya kritik kepada Presiden Jokowi karena membuka lagi izin ekspor pasir laut tampaknya tak akan mengubah pendirian pemerintah. Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan memastikan aturan itu tidak akan merusak lingkungan.

"Enggak dong. Semua, sekarang, sudah ada GPS (Global Positioning System), segala macam. Kita pastikan tidak ada (kerusakan lingkungan) pekerjaannya," kata Menko Luhut di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Menko Luhut menjawab, hampir bisa dipastikan, Presiden Jokowi tidak akan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sebentar lagi aksi penambangan dan ekspor pasir laut bakal berjalan.

Dalam beleid anyar ini, membuka peluang bisnis penambangan pasir laut serta ekspor. "Kalau harus diekspor, pasti bermanfaat untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," lanjut Menko Luhut.

Saat ini, kata Menko yang dipercaya Jokowi ini, pemerintah sedang melakukan pendalaman alur. Jika tidak, alur laut Indonesia, bakal semakin dangkal. "Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Atas aturan anyar ini, banyak kalangan yang berharap agar Jokowi

mencabutnya. Karena, pemberian izin tambang pasir laut sekaligus ekspor ke luar negeri, bakal merusak ekosistem laut, menghilangkan pulau-pulau kecil serta merugikan nelayan setempat.

Mulai dari eks Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti; Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan; Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar hingga Amirullah, nelayan dari Pulau Karimun, Kepri, menolaknya. Dan masih banyak para penolak PP 26/2023 yang diteken Jokowi pada 15 Mei 2023, bakal gigit jari.

Diketahui pada era Megawati, tepatnya pada 2003, aturan penambangan serta ekspor pasir laut dilarang. Melalui Keputusan Menteri Perindustrian Rini Soemarno, yakni Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Terpisah, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga menegaskan, peraturan tersebut hanya berfokus pada sedimentasi agar tidak terjadi pendangkalan. "Bukan untuk ekspornya tapi sedimentasinya yang diprioritaskan," kata Kepala KSP Moeldoko saat mengunjungi Tana Toraja, Selasa (30/5/2023).

Moeldoko tidak ingin berkomentar

terlalu jauh mengenai kebijakan ekspor pasir laut. Menurutnya, PP Nomor 26 Tahun 2023 hanya akan berfokus pada sedimentasi wilayah pesisir untuk mengatasi pendangkalan. "Sedimentasinya diprioritaskan agar pendangkalan-pendangkalan di area pesisir itu bisa dibenahin," ungkapny.

Sementara itu, Deputy II KSP, Abetnego Tarigan mengutarakan, PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Sehingga, kata dia, peraturan tersebut sudah mulai berjalan. "Iya PP-nya sudah ditandatangani Presiden, seharusnya sudah mulai berjalan," ucapnya.

Abetnego menjelaskan, PP tersebut mengatur lebih jelas mengenai pengelolaan sedimentasi pasir laut mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi hingga perizinan. Dia pun mengakui, sebelumnya pemerintah tidak memiliki peraturan serupa. "Ini terkait sedimentasi wilayah pesisir dan kemudian juga muara-muara sungai ini yang difokuskan. PP ini juga mengatur lebih jelas mulai dari perencanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi, termasuk juga perizinannya, dan memang sebelum-sebelumnya pemerintah tidak punya itu," jelasnya.

Pengusaha Mendukung dengan Catatan

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Arsjad Rasjid mendukung kebijakan pemerintah untuk kembali membuka

keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun.

Menurutnya, kebijakan ini dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri. Hanya saja ia memberikan catatan agar dalam pelaksanaannya tidak merusak lingkungan sehingga ada aspek berkelanjutan.

"Hal yang paling penting adalah balancing. Balancing antara kepentingan revenue kepada negara, baik untuk rakyat. Tapi di sisi lain kita memperhatikan mengenai sustainability-nya, yaitu masalah lingkungan," ungkap Arsjad di sela-sela forum bisnis Indonesia-Arab Saudi di Jakarta, Selasa (30/5/2023). "Jadi kita mendukung dengan catatan bahwa sustainability-nya, sustainable development-nya harus dipastikan. Itu aja utamanya," jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Arsjad menilai ekspor pasir laut memang memiliki nilai ekonomi yang potensial bagi Indonesia. Sebab banyak negara tidak memiliki sumber daya alam berupa pasir laut seperti Indonesia. "Minatnya pasti ada. Karena dengan ini kan tidak mungkin dibuka kalau tidak ada minat kan. Minatnya pasti ada," kata Arsjad.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa kebijakan ekspor ini harus tetap memperhatikan aspek lingkungan. "Inti-intinya kembali lagi tadi, kita mendukung semua upaya yang bisa menggerakkan ekonomi. Tapi tadi balik lagi, catatannya adalah bagaimana memastikan lingkungan hidupnya," tegasnya lagi. (wid,rls, mer/dya)



LUHUT B PANDJAITAN

Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves)

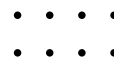
"Enggak dong. Semua, sekarang, sudah ada GPS (Global Positioning System), segala macam. Kita pastikan tidak ada (kerusakan lingkungan) pekerjaannya."



MOELDOKO

Kepala Staf Presiden (KSP)

"Bukan untuk ekspornya tapi sedimentasinya yang diprioritaskan. Sedimentasinya diprioritaskan agar pendangkalan-pendangkalan di area pesisir itu bisa dibenahin."



Genjot Desa Devisa Jadi Eksportir Komoditi Lokal

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka East Java International Trade Festival (EJITF) 2023 di Grand City Surabaya, Selasa (30/5/2023). Even ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan optimisme pelaku usaha serta mempererat kombinasi antar instansi penyedia layanan perdagangan luar negeri.

"Kegiatan itu, juga bertujuan meningkatkan nilai ekspor dan neraca perdagangan. Termasuk memperkuat peran Desa Devisa sebagai eksportir komoditi lokal," ujarnya kepada wartawan usai pembukaan East Java International Trade Festival.

Jatim sendiri hingga saat ini total memiliki 102 Desa Devisa. Khofifah memastikan akan memberikan respon cepat untuk memperluas Desa Devisa sesuai target LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). "Maka dari itu, East Java International Trade Festival sekaligus menjadi ajang peresmian Desa Devisa baru di Madura bekerjasama dengan LPEI," tegasnya.

Desa Devisa tersebut adalah Pasar Batik Aromatik di Kabupaten Bangkalan dengan total jumlah 11 desa. Kemudian Pasar Daun Kelor dan Rumput Laut di Kabupaten Sumenep total 27 desa. Sementara Desa Devisa yang bekerja sama dengan Bank Jatim adalah PT Kampung Cokelat Kabupaten Blitar.

Lalu komoditi jahe milik PT Enha Sentosa serta PT Astana Shoga Asia. Khofifah menjelaskan, program ekspor Desa Devisa sejalan dengan LPEI. "LPEI bersambung dengan program kita lewat Desa Devisa," ucapnya.

Ia menyebut, Jatim kali pertama membangun Desa Devisa dengan komoditi rumput laut di Sidoarjo dan terus meluas hingga kini. Berapa Desa Devisa baru telah lolos verifikasi. Hanya tinggal menunggu SK. "Karena masih ada yang sudah ditinjau dan kita menunggu SK," tandasnya.

Kemudian juga ada pendulum Desa Devisa sebagai penguat pengembangan. Sebagai contoh, Khofifah



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melihat kerajinan yang menjadi salah satu komoditi lokal yang berpotensi ekspor.

mengapresiasi Desa Devisa Batik Aromatik dan Rumput Laut di Madura yang sudah memiliki pasar ekspor di Jerman. Peran ekspor Desa Devisa dinilai seperti itu dinilai dapat menguatkan perekonomian desa dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

"Kita berharap penguatan ekonomi di desa berseiring dengan penurunan kemiskinan di desa, karena asumsi kita pasti akan terjadi pertumbuhan lebih inklusif di desa, makin banyak kesejahteraan yang menetes di desa dan makin banyak inovasi-inovasi dan kreativitas berbasis desa," tuturnya.

Khofifah berharap mulai Juli 2021 sudah tidak ada desa tertinggal di Jatim. Bahkan, sebaliknya. Ada 1.492 desa mandiri di Jatim. Jumlah itu merupakan tertinggi di antara provinsi di seluruh Indonesia. "Itu artinya bahwa kemandirian berseiring dengan pertumbuhan-pertumbuhan kreativitas inovasi dan ekonomi di desa," tegasnya.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim ingin membangun penguatan ekonomi berbasis desa dengan market global. Oleh karenanya, East Java International Trade Festival juga melibatkan stakeholder perdagangan luar negeri.

Tak lupa, Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha ekspor impor produk Jatim, serta instansi, lembaga yang mendorong pelaku usaha di Jatim untuk dapat menembus pasar luar negeri pada festival ini.

Perwakilan Anggota Dewan Direktur LPEI, Kasan mengungkapkan, LPEI atau Indonesia Exim Bank mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak. Terutama upaya mereka dalam pengembangan dan fasilitasi UMKM untuk go ekspor. Karena, UMKM di Jatim memiliki potensi ekspor yang cukup besar.

"Kami berharap East Java International Trade Festival dapat mendorong pelaku UKM di Jatim untuk menjadi eksportir sebagai kontributor terutama pendongkrak sektor perdagangan luar negeri," ucapnya.

LPEI sendiri merupakan lembaga khusus milik pemerintah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009. LPEI memiliki mandat untuk memberikan dan memfasilitasi pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor, asuransi ekspor dan jasa konsultan. Kegiatan pada hari ini di dalamnya adalah program Desa Devisa merupakan salah satu fokus LPEI.

Sedangkan dari sisi mandat jasa konsultasi, LPEI memiliki produk dan layanan dalam mendorong pelaku UMKM melalui pelatihan dan pengembangan ekspor atau program peningkatan volume ekspor serta pendampingan akses pasar Desa Devisa.

Sasaran Desa Devisa sendiri melibatkan komunitas (community development). Ada nelayan, petani, pengrajin, serta pelaku UMKM lain yang berorientasi ekspor. LPEI bertugas melakukan pendampingan akses pasar, peningkatan kualitas produksi, dan peningkatan kapasitas produk serta fasilitasi akses pembiayaan agar mereka dapat menjadi pelaku ekspor.

Sementara dalam rangka mendukung pertumbuhan ekspor di Jatim, LPEI mencatat jika sampai Mei 2023 telah memberikan pembiayaan kepada 65 eksportir dengan-outstanding sebesar Rp2,98 triliun. "Mudah-mudahan tahun ini akan terus meningkat dan juga tahun depan lebih dari capaian pada saat ini sampai dengan Bulan Mei," ujarnya.

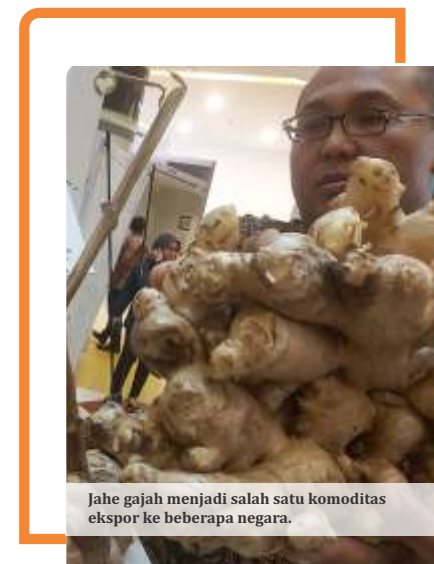
Selain itu, LPEI juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 351 UKM di Jatim dan 102 Desa Devisa yang berdampak pada 11.746 petani dan telah menciptakan sebanyak 77 eksportir baru pada sektor UKM.

Dalam East Java International Trade Festival, LPEI bahkan secara khusus menampilkan tujuh klaster Desa Devisa. "Kami berharap seluruh tujuh Desa Devisa menjadi bagian dari binaan LPEI dan seluruh pihak termasuk Pemprov Jatim bisa menjadikan Desa Devisa ini bagian dari kontributor ekonomi di Jatim dan juga nasional," ucapnya.

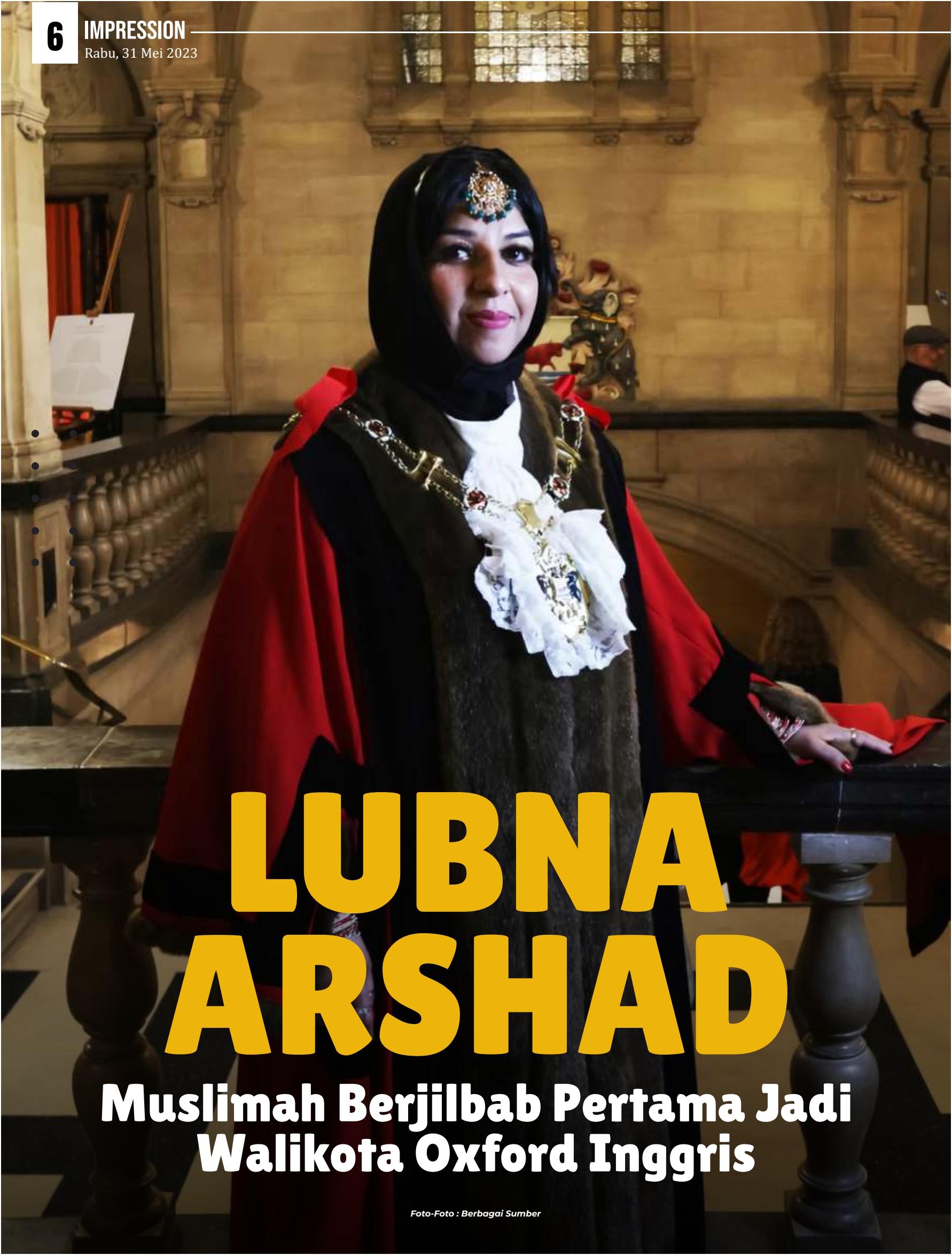
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah melepas ekspor produk milik enam perusahaan asal Jatim di Grand City Surabaya. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Mitra Saruta Indonesia (Benang Warna Recycle), PT Indo Rasa Utama (Keripik Singkong), PT Pei Hai International Wiratama Indonesia (Alas Kaki), PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (Frozen Shrimp), PT Smoore Technology Indonesia (Vuse Alto Pod) dan PT Asal Jaya (Robusta Coffee Grade).

Total nilai ekspor keenam perusahaan ini mencapai USD 18,80 juta atau Rp282 miliar. Dengan negara tujuan ekspor Taiwan, Amerika Serikat, Italia dan Spanyol.

Antara lain pelepasan ekspor komoditi kopi robusta 20 ton senilai USD 150 ke Taiwan. Kemudian ekspor udang beku perdana ke Amerika Serikat sebesar 15,24 ton atau USD 126,23 dan ekspor alas kaki 12,5 ton dengan nilai ekspor USD 99,9 juta tujuan Spanyol. (lut/dya)



Jahe gajah menjadi salah satu komoditas ekspor ke beberapa negara.



LUBNA ARSHAD

**Muslimah Berjilbab Pertama Jadi
Walikota Oxford Inggris**

LUBNA Arshad mencatat sejarah baru. Ia adalah perempuan kulit berwarna sekaligus muslimah pertama dalam sejarah yang dilantik sebagai Lord Mayor of Oxford atau wali kota Oxford pada Rabu 17 Mei 2023. Dengan hijab yang menutupi kepala, ia tampil berbeda.

Hal tersebut juga menjadi yang pertama dalam sejarah kota di Inggris itu. Lubna Arshad, yang sebelumnya adalah labour councillor, dilantik dalam sebuah upacara di Balai Kota Oxford. Pejabat sebelumnya, Kota James Fry pensiun dan mengundurkan diri.

Melansir BBC, Sabtu (27/5/2023), Lubna Arshad dilantik pada sebuah upacara di Balai Kota Oxford. Masa jabatan Lord Mayor tersebut adalah satu tahun dan hanya diberikan kepada anggota dewan terpilih.

Arshad mengatakan, merupakan kehormatan seumur hidup baginya untuk melayani di kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan.

"Saya merasa terhormat dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, melayani kota kelahiran saya," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Kota Oxford mengatakan, "Lubna mencetak sejarah sebagai perempuan kulit berwarna pertama, perempuan muslim pertama dengan latar belakang heterogen, sekaligus wali kota termuda."

Lord Mayor berbeda dengan Mayor (Wali Kota). Lord Mayor adalah warga negara pertama dari suatu kota dan dipilih oleh dewan setempat.

Sedangkan Mayor (Wali Kota) dipilih oleh warga lewat Pemilu. Lord Mayor punya masa jabatan satu tahun. Oxford dipimpin oleh Lord Mayor.

Lubna Arshad menjadi muslimah pertama yang menjadi Lord Mayor Oxford. Namun, dia bukan orang dengan latar belakang minoritas pertama yang menduduki jabatan itu.

Pada periode 2014/2015, ada Mohammed Abbasi yang menjadi Lord Mayor Oxford. Abbasi adalah keturunan Pakistan.

Profil Lubna Arshad

Lubna Arshad resmi menjadi Wali Kota Oxford yang baru. Mengutip dari situs resmi Kota Oxford, Anggota Dewan Lubna Arshad dilantik sebagai Wali Kota baru Oxford pada Rapat Dewan Tahunan, Rabu (17/5/2023) di Balai Kota Oxford.

"Saya merasa terhormat terpilih sebagai Walikota Oxford yang baru, Merupakan kehormatan seumur hidup untuk melayani kota tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, untuk dihargai dan dihormati dan memiliki kesempatan untuk melayani masyarakat Kota. Sebagai pelayan publik, saya selalu siap untuk melayani bangsa kita dan saya berdoa agar perdamaian dan keadilan berlaku di seluruh dunia," kata Anggota Dewan Lubna Arshad, Wali Kota Oxford.

Lubna Arshad lahir di Oxford, Inggris dan dibesarkan di kota tersebut. Ia menyelesaikan studinya dengan gelar BSc Hons di bidang Teknologi Jaringan Komputer dari Manchester.

Jenjang karier

Lubna Arshad memulai kariernya sebagai profesional di bidang teknologi jaringan komputer dengan pengalaman lebih dari 15 tahun.

Dengan pengalaman tersebut, Lubna terpilih sebagai Anggota Dewan Kota Oxford pada tahun 2018.

Selama menjadi anggota Dewan Kota Oxford, Lubna Arshad telah mengadvokasi kesetaraan gender, melindungi kebebasan beragama, dan memberantas kesenjangan upah.

Ia juga berkomitmen untuk mendukung kaum muda dan melawan kemiskinan.

Lubna Arshad juga adalah mantan kandidat MEP untuk Wilayah SE dan telah mewakili berbagai komite termasuk Panel Pengawasan, Perencanaan dan Panel Perumahan.

Latar belakang

Dilansir situs Warta Ahmadiyah, Lubna Arshad merupakan muslimah Ahmadiyah.

Sebagai seorang perempuan berkulit berwarna dan seorang muslim, Lubna Arshad mewakili kemajuan signifikan dalam mencapai kesetaraan, inklusivitas, dan representasi yang lebih baik dalam kepemimpinan.

Sebagai seorang ibu dengan dua anak, Lubna Arshad menunjukkan bahwa dedikasi terhadap keluarga tidak menghalangi seorang perempuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat.

Keberhasilan Lubna Arshad juga

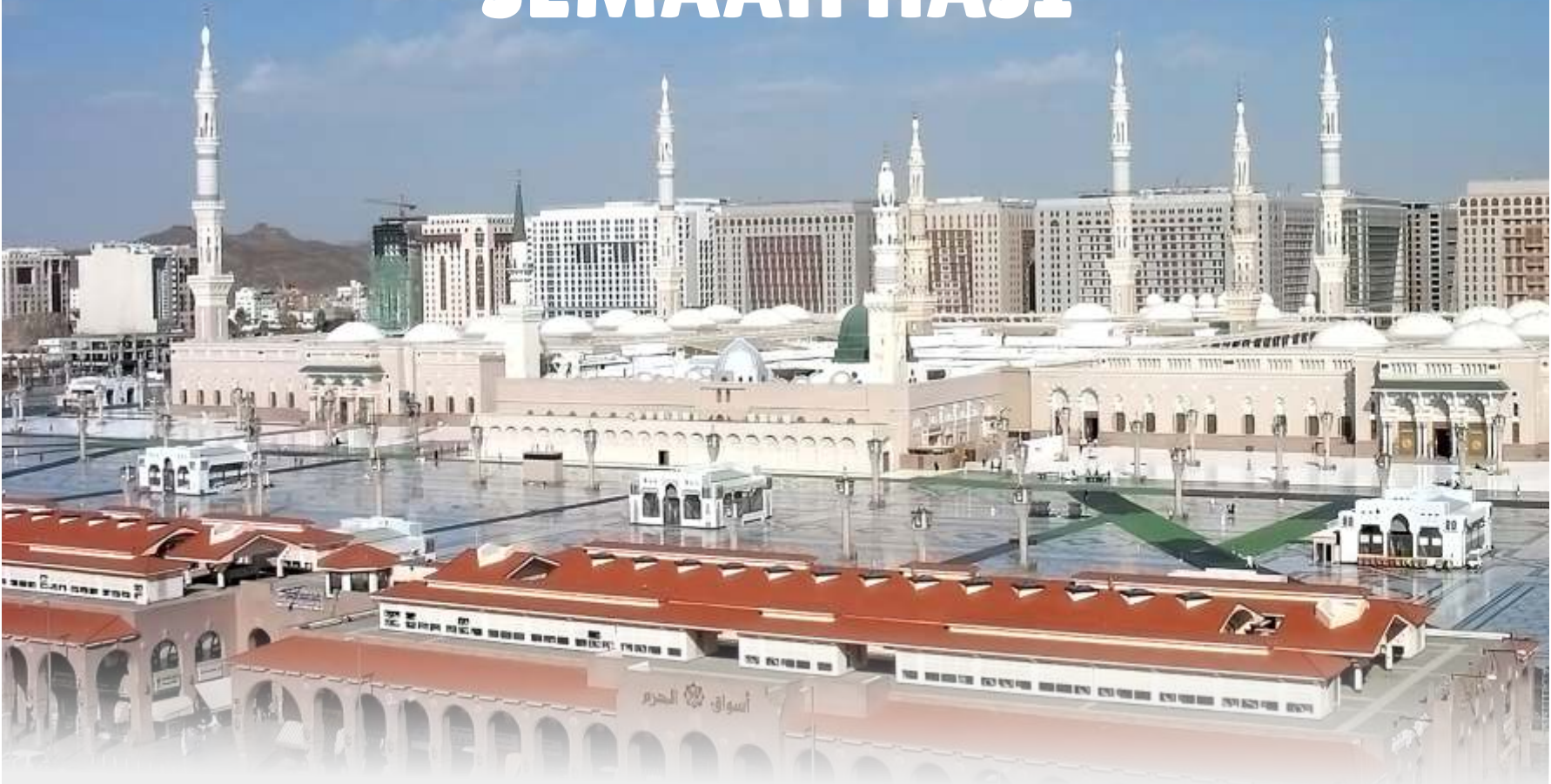
sejalan dengan ajaran Islam yang menghormati perempuan sebagai arsitek bangsa dan memberikan peran yang penting bagi perkembangan masa depan yang lebih baik.

Lubna Arshad menggarisbawahi pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya untuk mengejar gelar, tetapi juga penting untuk membentuk generasi mendatang yang kuat dan terdidik.

"Saya memegang keyakinan kuat bahwa perempuan adalah arsitek bangsa dan memegang kunci bagi masa depan yang lebih cerah," ungkapnya (berbagai sumber)



SUHU DI MADINAH PANAS, 10 IMBAUAN UNTUK CALON JEMAAH HAJI



SAAT ini, suhu di Kota Madinah mencapai hingga 40 derajat Celcius. Para calon jemaah haji yang sudah sampai di sana diimbau agar terus jaga kondisi, senantiasa terhidrasi karena rangkaian ibadah haji 2023 masih panjang.

Imbuan itu diungkapkan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI Liliék Marhaendro Susilo saat konferensi pers Media Center Haji Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat di kompleks Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Ia juga mengingatkan, karena kondisi Madinah sangat panas, para calon haji 2023, khususnya para jemaah haji lanjut usia (lansia) yang sudah tiba di Tanah Suci diimbau untuk menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya.

"Para jemaah khususnya para lansia untuk tetap menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruang. Mengingat saat ini kondisi cuaca di Madinah sedang dalam kondisi terik panas dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius," ujarnya.

Di tengah suhu yang berbeda dengan di Tanah Air, jemaah diminta untuk menghemat tenaga agar bisa menunaikan rangkaian haji yang utama seperti wukuf di Arafah nanti.

Biasanya, tibanya di Madinah

banyak jemaah Indonesia yang melaksanakan solat berjemaah sebanyak 40 waktu atau arbain.

Liliék mengimbau agar ini tidak perlu dilakukan jika merepotkan atau bahkan membahayakan jiwa.

Terutama bagi jemaah lansia, tidak perlu memaksakan solat berjemaah di Masjid Nabawi di tengah cuaca yang sangat panas ini.

"Jemaah juga bisa menunaikan salat di pemondokan, untuk menghindari kelelahan," katanya.

10 IMBAUAN UNTUK CALON HAJI 2023 DI MADINAH

Menurut Liliék, untuk menghindari kebingungan selama beribadah di Masjid Nabawi maupun saat kegiatan di Kota Madinah, ada beberapa panduan yang patut dilakukan.

Pertama, mencatat nama dan nomor pemondokan sebelum berangkat ke Masjid Nabawi.

Kedua, memberi tahu dan mencatat nomor kontak Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di pemondokan. Ketiga, mengenalkan identitas pengenal, terutama gelang jemaah. "Jangan tukar menukar gelang dengan jemaah lainnya," jelasnya.

Keempat, pergi dan pulang secara berkelompok.

Kelima, menggunakan pelembab kulit dan bibir untuk menghindari iritasi akibat cuaca panas.

Keenam, selalu menggunakan alas kaki dan kaus kaki untuk menghindari kaki melepuh.

"Jika kehilangan alas kaki, jangan memaksakan diri pulang ke hotel tanpa sandal di siang hari. Sebab, jalanan yang dilalui sangat panas. Hubungi petugas yang ada di sekitar jemaah," ungkap Liliék.

Ketujuh, upayakan selalu membawa dan minum air mineral 200 ml/jam secara teratur untuk menghindari dehidrasi. Jemaah diimbau meminum oralit 1 sachet per hari dicampur dengan 300ml air mineral untuk memulihkan kebugaran tubuh.

Kedelapan, atur irama keberangkatan dan kepulangan dari pemondokan menuju Masjid Nabawi, dan sebaliknya. Ini untuk menghindari penumpukan antrian lift di pemondokan.

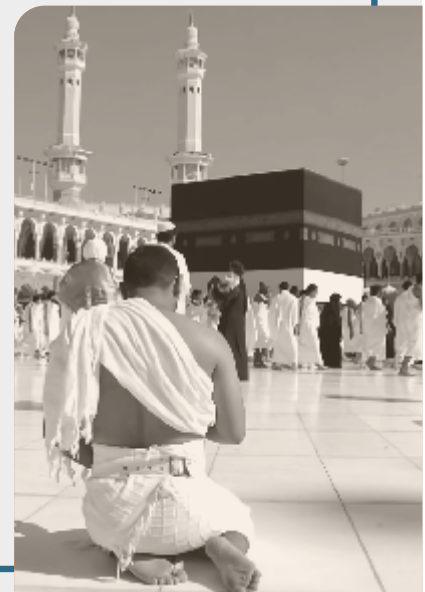
Kesembilan, selalu menjaga ketertibatan selama beribadah di Masjid Nabawi.

Kesepuluh, makan tepat waktu dan beristirahat yang cukup.

Liliék menambahkan, hingga Kamis (25/5/2023) pagi pukul 09.31 WIB, jemaah yang sudah terbang ke Tanah Suci melalui Bandara

Internasional Soekarno-Hatta berjumlah 8.446 orang yang tergabung dalam 22 kelompok terbang (kloter).

Adapun jemaah yang sudah tiba di Kota Madinah berjumlah 6.206 orang dalam 16 kloter. Data tersebut khusus jemaah haji, di luar petugas kloter (islami.co)



ANDA AKAN DITINGGAL OLEH KECERDASAN BUATAN

SALAH satu pendiri dan CEO Nvidia Corp, Jensen Huang, mengatakan bahwa perusahaan dan individu perlu membiasakan diri dengan kecerdasan buatan (AI) jika tak mau ditinggalkan.

Huang mengatakan pada Sabtu (27/5/2023) bahwa teknologi baru akan mengubah lanskap perusahaan dan mengubah setiap pekerjaan.

"Perusahaan-perusahaan yang tangkas akan memanfaatkan AI dan meningkatkan posisi mereka. Perusahaan yang kurang tangkas akan menghadapi kehancuran," jelas Huang.

Huang juga mengatakan bahwa sementara beberapa orang akan

khawatir bahwa AI akan mengambil alih pekerjaan mereka, seseorang yang ahli dalam AI akan melihat manfaat yang besar.

Teknologi AI yang semakin populer oleh ChatGPT dan OpenAI, akan digunakan sebagai kopilot untuk meningkatkan kinerja pekerja di berbagai industri.

Teknologi tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini akan membuat sebagian lapangan kerja lainnya menjadi usang dan makin tertinggal.

Prosesor Nvidia adalah standar

"emas" untuk melatih model AI seperti yang mendukung ChatGPT. Nvidia telah menjadi penerima manfaat utama dari perlombaan untuk menawarkan teknologi OpenAI kepada para pesaingnya.

Huang juga memberitahu bahwa perlu untuk membuat sesuatu yang baru di era AI dengan cepat, atau berisiko akan tertinggal.

"Dalam 40 tahun, kami menciptakan PC, Internet, seluler, cloud, dan sekarang era AI. Apa yang akan Anda buat? Apapun itu, kejar seperti yang kami lakukan. Lari, jangan berjalan," ucap Huang kepada para mahasiswa yang lulus di Universitas Nasional Taiwan di Taipei.

4 KEUNGGULAN

Bicara kecerdasan buatan (AI) tidak ada habisnya, perkembangan teknologi yang diberikan menciptakan peluang baru untuk maju dalam isu-isu kritis dan memberikan inovasi baru dalam kehidupan sehari-hari.

Kecerdasan yang dibuat AI menjadi sistem kecerdasan buatan sebagai yang lebih efisien, praktis, dan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa seiring perkembangan zaman AI menunjukkan mampu melakukan serangkaian tugas yang sulit, memiliki kemampuan berpikir seperti manusia dan melakukan hal diluar kemampuan manusia.

Kecerdasan yang dimiliki oleh AI tentu merupakan kecerdasan luar biasa yang dapat memahami sistem pemikiran manusia bekerja. Berikut 4 jenis keunggulan kecerdasan buatan:

1. Mesin reaktif

Mesin reaktif adalah sistem AI yang tidak memiliki memori dan khusus untuk melakukan tugas. Artinya, input selalu menghasilkan output yang sama. Model kecerdasan mesin ini cenderung menjadi mesin reaktif karena melakukan pengambilan data pelanggan seperti riwayat pembelian dan pencarian, dan menggunakannya untuk memberikan

rekomendasi kepada pelanggan yang sama.

Salah satu contoh adalah Deep Blue, kecerdasan buatan dari IBM ini dapat bermain catur dan mengalahkan grandmaster catur internasional, Garry Kasparov pada akhir tahun 1990.

2. Memori terbatas

Jenis kecerdasan buatan AI kedua adalah memori terbatas yang memiliki kemampuan untuk menyimpan memori mengenai masa lalu dan dapat bertindak berdasarkan memori tersebut.

Seperti contoh mobil self driving yang dapat mengemudi sendiri dengan mengamati mobil lain di jalan untuk kecepatan, arah dan kedekatannya. Hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam satu waktu, namun dalam sejumlah waktu yang dapat diingatnya.

3. Teori pikiran

Teori pikiran adalah tipe AI yang akan dibangun di masa depan karena itu belum ada contohnya mengenai jenis ini. Teori pikiran AI berpotensi untuk memahami dunia dan bagaimana entitas lain memiliki pikiran dan emosi.

Teori pikiran ini merupakan hal penting untuk manusia karena memahami pemikiran dan emosi orang lain untuk dapat berinteraksi sosial

4. Kesadaran diri

Jenis terakhir adalah kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan merancang sistem yang memiliki rasa diri, pemahaman sadar akan keberadaannya. Ini melangkah melampaui teori pikiran AI yang memahami emosi, untuk menyadari diri mereka sendiri, keadaan mereka dan mampu merasakan atau memprediksi perasaan orang lain seperti "saya lapar" (bisnis)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

TREN RIASAN MUSIM PANAS SUPAYA TERLIHAT SEGAR

CUACA panas ekstrem kerap menyerang banyak kota-kota di Indonesia. Berbeda dengan panas yang biasanya dirasakan sehari-hari, cuaca ekstrem ini bisa membuat suhu di siang hari mencapai 37 derajat Celsius. Tidak heran, mayoritas orang akan merasa kegerahan.

Bukan hanya itu saja, banyak sekali keluhan kesehatan yang bisa muncul karena cuaca panas. Kondisi seperti heat stroke, dehidrasi, hingga masalah kulit menjadi lebih sering terjadi.

Vogue India merangkum beberapa riasan yang akan menjadi tren di musim panas 2023 ini.

Akan ada tren kulit mengkilap, eyeshadow yang berkilau dan lipgloss lembab serta tatanan rambut tampak basah agar berkilau di bawah sinar matahari.

Selain itu, pulasan make up yang lebih tipis dan ringan juga akan menjadi tren musim panas ini.

Perona pipi dengan warna sheer dan bold menjadi tren blush on yang berani menuju ke beberapa musim berikutnya.

Akan ada lebih banyak blush on di pipi, pelipis, dan pangkal hidung, tetapi untuk membuatnya tetap segar, terapkan dengan formula yang lebih tipis.

Disamping itu, tren riasan putri duyung seiring dengan munculnya film live action "The Little Mermaid" yang diperankan oleh Halle Bailey, membuat muncul kembali riasan eyeshadow nuansa akuatik, kulit yang sangat lembab, rambut yang terlihat basah, bibir yang mengkilap dan bahkan detail mutiara seperti stiker wajah atau eyeliner.

Pulasan pewarna mata pop warna cerah dan penuh juga akan menjadi tren di musim panas kali ini dengan tambahan eyeliner warna-warni ataupun warna neon di sepanjang garis bulu mata agar terlihat segar.

Selain warna cerah, riasan mata bergaya Grunge atau smokey eye juga akan masih menjadi tren.

Sesuaikan dengan musim dengan pulasan yang sedikit lebih tipis dari sebelumnya dengan corak semi-matte.

Sematkan juga kontur wajah tipis

untuk memperlihatkan kesan alami dan alas bedak yang tidak terlalu tebal.

Percantik juga dengan bulu mata dan riasan cat kuku warna merah muda untuk tampilan lebih mencolok.

Perhatikan faktor lain

Cuaca yang panas akan meningkatkan jumlah air yang keluar dari tubuh dalam bentuk keringat. Ini membuat Anda lebih cepat merasa dehidrasi. Jangan salah, dehidrasi tidak hanya terjadi pada tenggorokan saja.

Kulit juga bisa dehidrasi jika tidak mendapatkan cairan yang cukup, sehingga menyebabkan iritasi, kemerahan, dan kulit kering.

Untuk menjaga hidrasi kulit, pastikan minum air

yang banyak sebelum haus. Anda bisa membawa botol semprot air kemanapun pergi agar bisa merehidrasi wajah ketika kering.

Gunakan pakaian yang sesuai. Jangan sampai salah kostum ketika bepergian. Ketika cuaca panas, sebaiknya pakai baju dengan bahan yang ringan dan longgar di tubuh.

Anda bisa mencari bahan katun atau linen yang mudah menyerap keringat alih-alih bahan kulit,

poliester, atau wol yang menahan panas keluar.

Lalu, perhatikan juga warna pakaian. Menggunakan baju berwarna gelap akan merasa lebih kepanasan karena warna gelap lebih menyerap panas. Pilih warna-warna terang seperti putih, krem, atau pastel untuk menyejukkan tubuh.

Sinar matahari yang paling terik adalah saat jam 11 pagi hingga jam 3 sore. Nah, sebisa mungkin pada saat ini jauhilah sinar matahari langsung.

Jika memaksakan diri, tidak hanya sinar matahari bisa merusak kulit, tapi juga akan lebih kepanasan karena



Tarik Urat Lagi ... (dari hal 1)

OMBUDSMAN mengungkap KPK tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan Brigjen Endar Priantoro soal dugaan maladministrasi pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pihak KPK menilai Ombudsman tidak memiliki wewenang mengusut kasus Endar.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa mengatakan polemik pemberhentian Endar dari KPK tidak masuk ke ranah pelayanan publik. Kasus itu, kata Cahya, lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Penyelesaian persoalan ini memedomani hukum administrasi kepegawaian ataupun administrasi pemerintahan sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bermuara pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan di Ombudsman," kata Cahya kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Menurut Cahya, proses rekrutmen hingga puna tugas tiap pegawai KPK merupakan bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) KPK. Proses itu bukan bagian dalam pelayanan publik. "Demikian halnya pada proses pemberhentian saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang telah selesai masa tugasnya adalah ranah manajemen ke-SDM-an di KPK, bukan pelayanan publik," katanya.

Cahya mengatakan KPK tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Ombudsman setelah meyakini kasus pencopotan Endar seharusnya tidak menjadi wewenang dari Ombudsman. "Oleh karenanya, atas permintaan klarifikasi oleh Ombudsman kepada KPK tidak bisa dipenuhi, karena substansi yang hendak diklarifikasi tidak termasuk dalam ranah pelayanan publik yang merupakan kewenangan Ombudsman. Namun, berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, pengujian persoalan kepegawaian lebih tepat ranahnya di PTUN," tutur Cahya.

Terpisah, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, meminta KPK tidak membuat gaduh. "KPK jangan buat gaduh. Datangi saja Ombudsman kan

dekat jalan kaki juga bisa," kata Yudi kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini meminta KPK memberikan contoh sebagai penegak hukum. Menurutnya, KPK tidak memiliki wewenang dalam memper-tanyakan wewenang dari Ombudsman. "KPK sebagai penegak hukum harus memberi contoh bagaimana kehidupan bernegara berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bukan ranah KPK menginterpretasikan kewenangan Ombudsman," ujar Yudi.

Yudi mengatakan pemanggilan dari Ombudsman seharusnya menjadi momen KPK untuk memberikan klarifikasi yang runut perihal polemik pencopotan Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. "Bahwa Ombudsman meng-undang KPK atas laporan Brigjen Endar artinya Ombudsman member-kan kesempatan kepada KPK untuk mengklarifikasi pemberhentian dan pencopotan yang bersangkutan sebagai Direktur Penyelidikan. Jika KPK merasa benar mengapa takut datang?," katanya.

Yudi juga mengungkit sikap pimpinan KPK yang bersedia mendatangi Ombudsman saat kisruh Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Namun, hal itu tidak diterapkan kembali di polemik kasus pencopotan Endar. "KPK trauma ketika dulu Ombudsman berhasil membongkar adanya maladministrasi proses TWK saat menyingkirkan 57 pegawai terbaiknya. Saat itu saja KPK datang ke Ombudsman, kok sekarang tidak kan ini aneh," katanya.

Ombudsman Merasa 'Dikuliahi'

Terpisah, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, berang karena pihak KPK tak memenuhi panggilan terkait dugaan maladministrasi pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK. Robert merasa institusinya 'dikuliahi' oleh lembaga yang tak punya kewenangan memberi pandangan soal kinerja Ombudsman.

"Ini lebih luar biasa lagi, ada lembaga yang nguliahi kami yang sudah bertahun-tahun bekerja

dengan ketentuan yang ada, tahu-tahu ada lembaga yang nggak punya urusan, nggak punya kewenangan memberikan pandangan yang intinya adalah agar Ombudsman tidak kemudian jatuh dalam penyalahgunaan kewenangan," kata Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Robert mengatakan Ombudsman telah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada pihak KPK terkait laporan Endar. Namun, menurut dia, KPK memilih membalas surat dibanding datang memenuhi panggilan.

"Surat disampaikan tanggal 22 Mei, artinya minggu lalu, untuk pemeriksaan kemarin siang, dan saya sempat mengirimkan informasi bahwa pemeriksaan itu akan dilakukan kemarin siang, tapi kembali alih-alih datang memenuhi pe-manggilan Ombudsman, kami kemudian mendapatkan kiriman surat lagi. Jadi rajin sekali mengirim surat, yang isinya bukan dan tentu tidak menjawab pertanyaan, karena memang belum ada pertanyaan yang kita sampaikan, pertanyaan akan diajukan nanti ketika di ruangan pemeriksaan," katanya.

Robert mengatakan pihaknya ogah membalas surat KPK yang memper-tanyakan kewenangan Ombudsman dalam menangani laporan Endar. Dia menyebutkan Ombudsman kembali mengirim surat panggilan.

"Tentu kami tidak menjawab surat itu, karena ini memang bukan berbalas pantun, surat dijawab dengan surat. Ombudsman menempuh prosedur sebagaimana standar yang ada, dikirimkan lagi surat pemanggilan berikutnya. Jadi tidak menjawab karena memang ini bukan konteks balas-membalas surat," ujarnya.

Ombudsman pun mengkaji tiga opsi apabila KPK tidak kunjung memenuhi permintaan klarifikasi. Opsi pertama, kata Robert, keterangan yang dapat disampaikan oleh KPK melalui surat tertulis. Kedua, yang bersangkutan dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban.

Lalu terdapat opsi ketiga. Opsi ini adalah upaya jemput paksa. Robert menegaskan, Ombudsman punya kewenangan tersebut. "Sesuai dengan

ketentuan pasal 31 UU 37 tahun 2008 bahwa Ombudsman bisa meng-hadirkan dan berwenang menghadirkan terlapor secara paksa, pemanggilan paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Robert.

Upaya paksa tersebut dapat diambil ketika Ombudsman menilai ketidakhadiran terlapor karena unsur kesengajaan. Dia menyebut indikasi itu sudah ada. "Apalagi secara terang benderang menyampaikan argumen-tasi yang justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman," kata dia.

Kasus Endar berawal dari saat KPK tak mengajukan permohonan per-pangangan masa jabatannya di lembaga antirasuah. Padahal, penugasan-nya di KPK berakhir per 31 Maret 2023. KPK pun memberhentikan Endar dengan hormat dari jabatannya sebagai direktur Penyelidikan KPK. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ronald Worotikan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK menggantikan Endar.

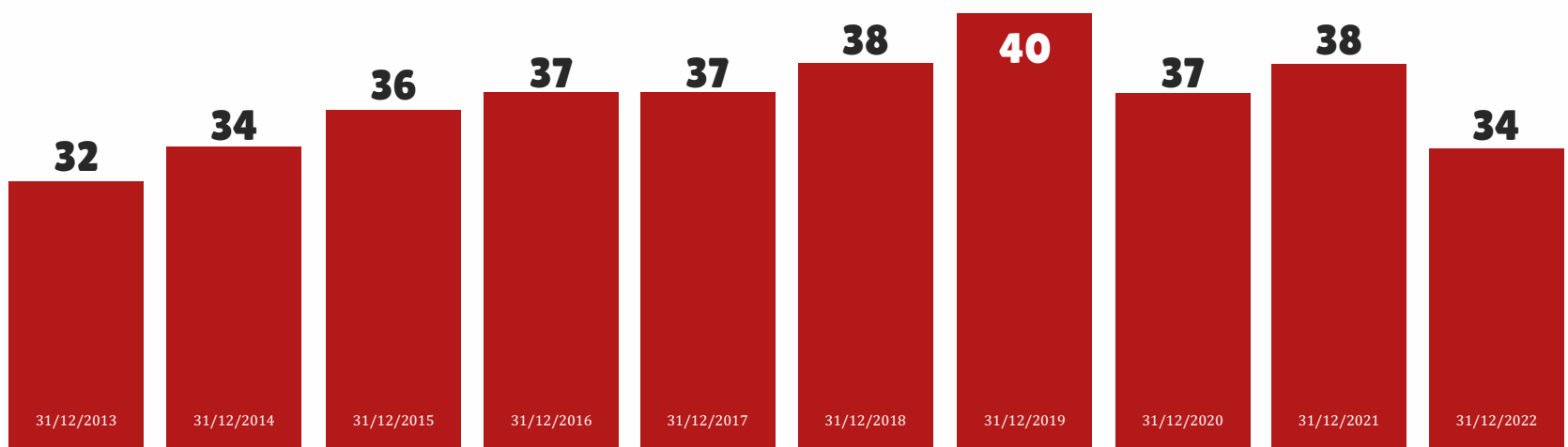
Menyusul putusan pemberhentian ini, Endar kemudian melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Endar meyakini pencopotannya bermuatan dugaan pelanggaran kode etik.

Endar menuding KPK terkesan tak menghargai institusi Polri. Hal ini dibuktikan dengan pemberhentian Endar meski Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah resmi mengirim surat ke KPK untuk memper-panjang masa dinas di KPK.

Selain itu, Endar juga turut melaporkan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Dengan demikian, total ada tiga laporan yang dilayangkan jenderal bintang satu ini ke Dewas KPK.

Menurut Endar, dugaan mal-administrasi itu dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, dan juga pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dia juga menilai, adanya pola intervensi dalam independensi penegakan hukum yang terjadi lebih dari satu kali. (wid,rls,ist,kum/dya)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA (2002–2022)





PEMROV JATIM RAIH OPINI WTP 8 KALI BERTURUT-TURUT, DPRD MINTA SEGERA TINDAK LANJUTI REKOMENDASI BPK



Penyerahan Opini WTP oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi di hadapan seluruh anggota DPRD pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Selasa (30/5/2023) pagi.

SURABAYA – Provinsi Jawa Timur berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 8 kali berturut-turut sejak 2015, sekaligus merupakan kali ke-12 sejak tahun 2010.

Opini WTP tersebut diberikan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi di hadapan seluruh anggota DPRD pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Selasa (30/5/2023) pagi.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah yang juga menjadi pimpinan rapat paripurna mengatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, dan juga badan layanan umum, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara.

BPK juga melaksanakan ketentuan dalam dua peraturan perundangan yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK pada DPRD selambat lambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Kemudian, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020

tentang pedoman pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada badan pemeriksa keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Dan pada saat ini BPK perwakilan Jawa Timur telah menyelesaikan tugasnya untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur 2022, dimana melalui sidang paripurna hari ini telah siap dilakukan penyerahan LHP BPK yang dimaksud pada pemerintah Provinsi Jawa Timur," katanya.

Sementara itu, anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, bahwa BPK memberikan opini WTP dengan penekanan suatu hal atas LKPD Tahun 2022. Dan ini menjadikan Pemprov Jatim meraih opini WTP Delapan Kali berturut-turut sejak tahun 2015.

Ia mengatakan, bahwa pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada kesesuaian dengan standar Akutansi Pemerintahan, Efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan hingga kecukupan pengungkapan.

Ahmadi menjelaskan, bahwa BPK juga masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian

Laporan Keuangan Tahun 2022.

Kelemahan tersebut antara lain pengendalian belanja hibah berupa uang pada Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Dinas Perubahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp 2,42 miliar. Kedua, pelaksanaan pekerjaan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada delapan SKPD tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pendapatan belum diterima kas daerah sebesar Rp 8,87 miliar karena kurang volume dan kesalahan perhitungan pada backup penagihan pembayaran.

Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pekerjaan atas Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan umum Bina Marga tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran dari pendapatan belum diterima kas daerah sebesar Rp 2,38 miliar.

"BPK mendorong Pemprov Jatim untuk meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. BPK juga berharap agar DPRD bersama Pemprov Jatim terus berupaya memperbaiki pertanggung jawaban pelaksanaan APBD," terangnya.

"Selain itu, juga memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP BPK sesuai dengan kewenangannya," pungkasnya.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Hadi Dediansyah, mengapresiasi capaian Pemprov Jatim yang mendapatkan Opini WTP 8 kali berturut-turut. Pencapaian tersebut dinilai sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. "Dalam pemberian WTP oleh BPK tadi bahwa ada beberapa catatan. Catatan yang terbesar itu khususnya di kemitraan komisi D. Lha ini yang harus menjadi perhatian khusus bahwa kelebihan bayar yang terjadi di mitra komisi D salah satunya adalah di PU Bina Marga, PU Cipta Karya kemudian di beberapa OPD yang lain," tandasnya.

Maka, lanjutnya perlu penekanan bahwa OPD terkait harus lebih memperhatikan dan lebih seksama dalam proses pembayaran ke anggaran yang dibutuhkan. "Namun, demikian karena ini masih dalam tahapan atau taraf penemuan atau taraf temuan, saya rasa ini merupakan hal yang wajar karena dalam durasi 60 hari ke depan kewajiban-kewajiban yang merupakan kelebihan bayar itu

harus diselesaikan ke kas daerah," tegasnya.

Terkait masalah ini, komisi D akan melakukan pengawasan lebih ditingkatkan dan lebih maksimal. "Jadi karena ini bagian dan mitra komisi D, maka akan melakukan peningkatan pengawasan terutama dalam persoalan sorses verifikasinya," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan rasa sukurnya atas raih opini dari BPK RI ini. "Kita patut bersyukur dapat mempertahankan capaian WTP untuk ke 8 kalinya secara berturut-turut. Tentu ini akan menjadi langkah awal untuk melakukan berbagai penyempurnaan terhadap pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2022," tegas Gubernur Khofifah.

Secara khusus, Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa terima kasih atas seluruh kerja keras semua lini utamanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim. Menurutnya, Opini WTP 8 kali secara berturut-turut ini merupakan capaian yang sangat positif bagi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Namun demikian, pihaknya juga tetap menekankan bahwa opini WTP yang berhasil dipertahankan itu, bukanlah tujuan akhir dari proses pelaksanaan APBD. Melainkan menjadi langkah awal untuk terus melakukan penyempurnaan dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Gubernur Khofifah menjelaskan, masih terdapat rekomendasi pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti dan disempurnakan. Oleh karenanya, Pemprov Jatim akan segera bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan rekomendasi atas pemeriksaan LKPD TA 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada seluruh OPD di Pemprov Jatim.

Khofifah memastikan bahwa Pemprov Jatim bersama Kabupaten/Kota berkomitmen akan melakukan percepatan menindaklanjuti seluruh catatan rekomendasi dari BPK RI. Baik untuk Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

"Dari catatan dan rekomendasi dari BPK RI, Pemprov Jatim akan melakukan langkah percepatan rekomendasi tindak lanjut dari temuan BPK RI untuk seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim," tegasnya. (lut/dya/adv)